

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I-B

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata 1 Pada
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

NUR AZLIN
NIM. 11775200092

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NAMA

NIM

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

JUDUL SKRIPSI

: NUR AZLIN

: 11775200092

: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
KELAS 1-B

DISETUJUI OLEH

DOSEN PEMBIMBING

Irdayanti, S.IP, MA

NIK. 130 411 030

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Des. H. Muh. Said HM, M. Ag. MM.

NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si.

NIP. 19790101 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUR AZLIN
 NIM : 11775200092
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1-B
 TANGGAL UJIAN : 17 JUNI 2021

Disetujui Oleh
 KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Julina, SE., M.Si.

NIP. 19730722 199903 2 001

PENGUJI I

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19811030 200710 2 004

PENGUJI II

Ronv java, S.Sos., M.Si.

NIK. 130 717 060



ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1-B

Oleh : Nur Azlin

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi dari sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian, dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam implementasi sistem dan prosedur administrasi perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan satu variable dalam konsep operasionalnya yaitu berpedoman pada teori Edward yang menjadi sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu Komuniasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B yang saat ini selain menggunakan sistem manual juga telah menggunakan sistem E-court dalam proses administrasi penyelesaian perkara perceraian. Namun dengan adanya perubahan sistem tersebut menyebabkan beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Jika dengan sistem manual masyarakat merasa adanya kendala terkait biaya yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk sistem E-court juga belum dapat terlaksana dengan baik, disebabkan oleh sarana dan prasaran di sejumlah wilayah masyarakat tinggal yang berbeda-beda seperti keterbatasan teknologi dan jaringan. Selain itu pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap sistem tersebut juga menjadi kendala, terutama harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti email aktif, nomor rekening, aktivasi akun yang mana bagi masyarakat dengan pendidikan rendah akan sulit menjangkaunya. Begitu juga dengan sumber daya dan sarana prasarana di pengadilan agama Bangkinang juga masih kurang, terlihat dari kurangnya jumlah petugas dan komputer di bagian pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem dan Prosedur, Administasi, Perceraian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1-B"**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Masniati dan Ayahanda Bapak Azhar terimakasih telah merawat, membesarkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag.
4. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si.
5. Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M.A
6. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.
7. Pembimbing Akademik Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M. KP.
8. Dosen Pembimbing Ibu Irdyanti S.IP, MA
9. Dosen serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara.
10. Kepada saudara kandung penulis Nur Azira S.Pd., Muhammad Haris, Nur Syafira, Nur Zaskia Az-zahra, dan Nur Syaqla Rafanda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Kepada kerabat terdekat penulis Anisa Pauzana S. Psi, dan Irwan Junaidi yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan pelajaran berharga yang tidak akan terlupakan.
12. Kepada sahabat tercinta dari SMA sampai sekarang yang selalu memberikan support dan doa dalam perjuangan penulis dalam membuat skripsi.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis Miftahurrahmah, Fitria Annisa, Nurfadlah, dan Via Sapira, yang selalu berjuang dari titik nol dalam proses skripsi sampai saat sekarang ini Insyaa Allah Wisuda bareng. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, April 2021
Penulis

NUR AZLIN
NIM. 11775200092

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL..... ix

BAB 1 PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Rumusan Masalah.....10

1.3 Tujuan Penelitian10

1.4 Kegunaan Penelitian11

1.5 Batasan Penelitian.....12

1.6 Sistematika Penulisan12

BAB II LANDASAN TEORI14

2.1 Implementasi14

2.1.1 Pengertian Implementasi.....14

2.1.2 Model Implementasi.....15

2.2 Sistem dan Prosedur16

2.2.1 Pengertian Sistem.....16

2.2.2 Sistem E-Court.....18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.2.3	Pengertian Prosedur	20
2.3	Pelayanan	21
2.3.1	Pengetian Pelayanan.....	21
2.3.2	Prinsip Standar Pelayanan.....	23
2.3.3	Azas-Azas Pelayanan	24
2.3.4	Standar Pelayanan	25
2.4	Administrasi	26
2.5	Perceraian.....	28
2.5.1	Pengertian Perceraian.....	28
2.5.3	Proses Administrasi Perceraian.....	29
2.5.3	Prosedur Berperkara Secara Manual.....	33
2.5.4	Prosedur Berperkara Secara E-court.....	35
2.6	Pandangan Islam Terhadap Penelitian	42
2.7	Kajian Terdahulu.....	44
2.8	Definisi Konsep.....	46
2.9	Operasional Konsep	47
2.10	Kerangka pemikiran.....	48

BAB III METODE PENELITIAN50

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.2	Jenis dan Sumber Penelitian.....	50
3.2.1	Jenis Penelitian.....	50
3.2.2	Sumber Data	50
3.3	Informan Penelitian.....	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Teknik Analisa Data.....	53
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	55
4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.....	55
4.1.1 Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	58
4.2 Tupoksi Serta Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	59
4.2.1 Tugas Pokok Pengadilan	59
4.2.2 Fungsi Pengadilan	61
4.2.3 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	62
4.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	63
4.4 Daftar Nama Pimpinan Dari Masa Ke Masa Ketua PA Bangkinang Kelas 1-B.....	64
4.4.1 Daftar Nama Wakil Ketua PA Bangkinang Kelas 1-B	65
4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.....	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	67
5.1.1 Komunikasi Dalam Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5.1.2	Sumber Daya Dalam Implemetasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.....	77
5.1.3	Disposisi Dalam Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.....	83
5.1.4	Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	88
5.2	Kendala Dalam Implementasi Sistem Dan Prosedur Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B	92
BAB VI PENUTUP		100
6.1	Kesimpulan.....	100
6.2	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN.....		

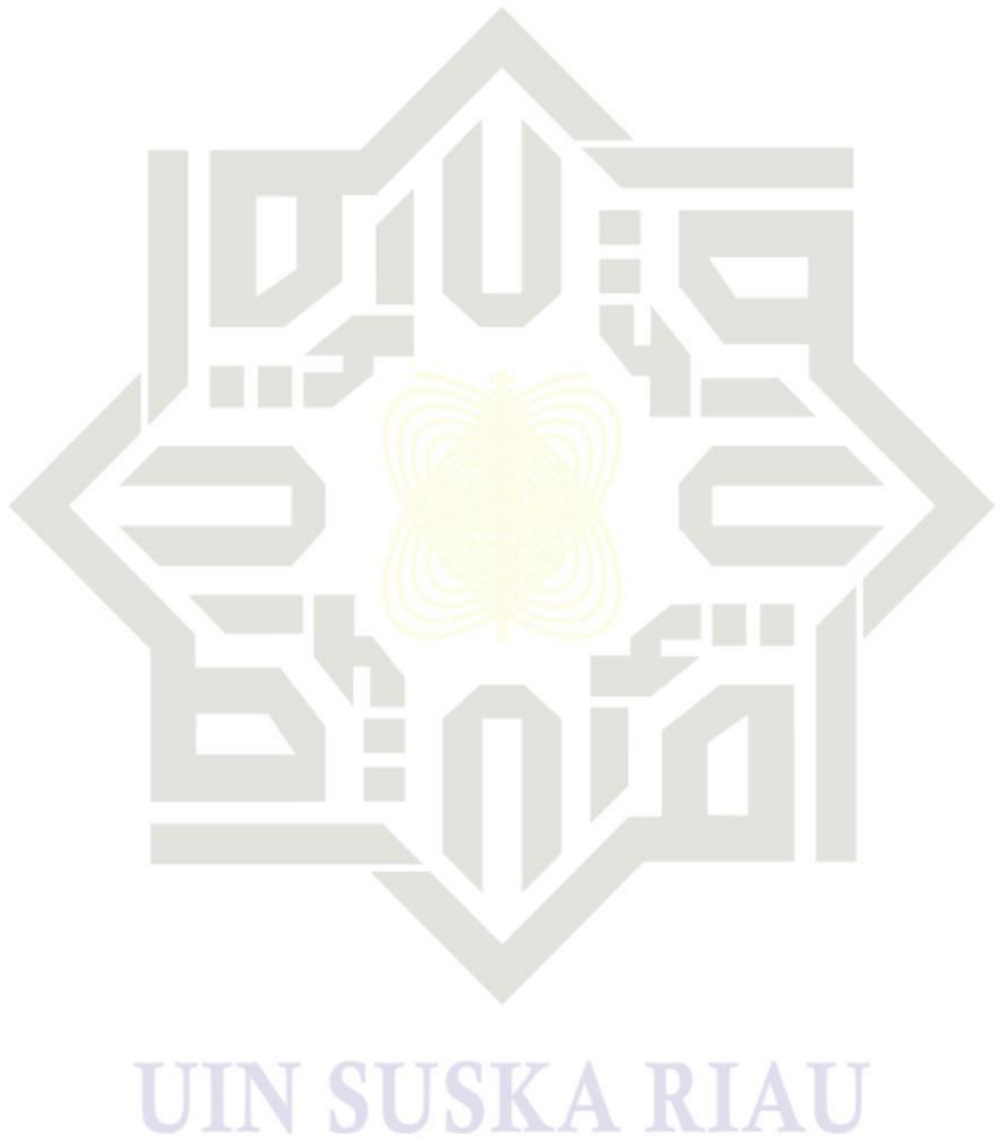


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Rekapitulasi Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.....	4
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	31
Tabel 2.2 Variable Konsep.....	35
Tabel 3.1 Key Informan Penelitian	39
Table 4.1 Nama Ketua PA Bangkinang Dari Masa Ke Masa.....	50
Tabel 4.2 Nama Wakil Ketua PA Bangkinang Dari Masa Ke Masa.....	51
Table 5.1 Data Jumlah Pengguna Aplikasi E-Court dan Manual Pada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B Periode tahun 2018-2020.....	68

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Regulasi yang dibuat oleh Negara berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dicita-citakan yaitu menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar konstitusi memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat khusus di bidang hukum keluarga bagaimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga melalui hukum-hukum publik yang dibuatnya. Hukum-hukum publik tersebut antara lain diatungkan dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Peradilan Agama dan lain sebagainya. Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dalam ranah hukum keluarga, tetapi permasalahan-permasalahan di lingkungan hukum keluarga khususnya perkawinan tetap saja terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi dalam lingkup perkawinan ialah terjadinya perceraian (Ismayana, 2017: 318).

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian. Proses perceraian di Indonesia hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri untuk non-muslim (Sampurna dan Yuliani, 2017: 54). Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan “putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan perkawinan diputuskan. Cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh isteri kepada suaminya dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memproses dan memutuskan untuk menceraikannya (Abubakar, 2020: 302).

Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Dengan demikian, perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum, Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak termasuk konsekuensi dari adanya perceraian sangat ditentukan oleh alasan-alasan diajukannya suatu perceraian.

Pengadilan Agama yang merupakan sistem hukum di Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani berbagai persoalan kemasyarakatan khusus bagi yang memeluk agama Islam. Dasar kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan shadaqah* (Suharto, 2015: 116). Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan tersebut dan juga sebagai salah satu pranata dari hukum modern yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dunia. Pada saat itulah lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan negara dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah terkait perkara perceraian.

Banyaknya perceraian di Indonesia terutama disebabkan oleh banyaknya orang yang berperkara di Pengadilan Agama yang mana per Agustus tahun 2020 saja sudah mencapai 306.688 kasus. Di Provinsi Riau sebagaimana tercatat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 ada sebanyak 8.238 kasus, sedangkan pada wilayah Kabupaten Kampar yang juga merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki jumlah angka perceraian dari tahun ke tahunnya yaitu pada tahun 2018 tercatat sebanyak 938 kasus perceraian yang telah diadili di Pengadilan Agama Bangkinang, kemudian pada tahun 2019 jumlah perceraian meningkat menjadi 973 kasus, hingga pada tahun 2020 angka perceraian telah mencapai 1583 kasus perceraian. Berikut Data Jumlah dan Rekapitulasi Penyebab Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Jumlah dan Rekapitulasi Penyebab Perkara Perceraian Pada
Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Jumlah Perkara Perceraian	938	973	1583
	Cerai gugat	286	256	560
	Cerai talak	652	717	1023
2.	Rekapitulasi penyebab perceraian			
	-meninggalkan salah satu pihak	51	148	481
	-perselisihan dan pertengkaran	887	791	858
	-ekonomi	0	25	207
	-KDRT	0	4	15
	-Murtad	0	2	0
	-Zina	0	2	0
	-Judi	0	1	12
	-Poligami	0	0	10
	-Mabuk	0	0	0
	-Cacat Badan	0	0	0
	-Dipenjara	0	0	0
	JUMLAH	938	973	1583

Sumber Data : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B Tahun 2018-2020.

Keterangan :

1. Dari jumlah data rekapitulasi penyebab perkara perceraian terdapat jumlah perkara perceraian pada tahun 2018 sejumlah 938 kasus yang terdiri dari 286 cerai gugat dan 652 cerai talak yang terjadi akibat adanya 51 kasus meninggalkan salah satu pihak, 887 perselisihan dan pertengkaran.
2. Pada tahun 2019 terdapat 973 kasus perceraian yang terdiri dari 256 cerai gugat dan 717 cerai talak yang terjadi akibat adanya 148 kasus meninggalkan salah satu pihak, 791 perselisihan dan pertengkaran, 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus akibat ekonomi, 4 kasus KDRT, 2 kasus murtad, 2 kasus zina, dan 1 kasus judi.

3. Pada tahun 2020 terdapat kasus perceraian yang terdiri dari 560 cerai gugat dan 1023 cerai talak yang terjadi akibat adanya 481 kasus meninggalkan salah satu pihak, 858 perselisihan dan pertengkaran, 207 kasus akibat ekonomi, 15 kasus KDRT, 12 kasus judi, dan 10 kasus poligami.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka cerai talak maupun gugatan di pengadilan agama Bangkinang yang disebabkan oleh adanya perkara yaitu meninggalkan salah satu pihak baik itu dari pihak suami maupun istri, kemudian pertengkaran dan perselisihan, sulitnya perekonomian hidup, perjudian, poligami dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga diperhitungkan sebagai faktor yang menjadi penyebab banyaknya pasangan suami-istri bercerai.

Faktanya dengan adanya kasus perceraian yang mengalami jumlah peningkatan setiap tahunnya ini, dan juga yang disebabkan oleh berbagai macam perkara lainnya tentu akan ada banyak jumlah orang yang akan datang ke Pengadilan Agama untuk menangani berbagai macam persoalan. Di sini Pengadilan Agama tidak hanya berperan dalam mengadili dan memutuskan perceraian saja, namun Pengadilan Agama juga berupaya untuk menekankan dan mengurangi angka perceraian yang selalu meningkat dengan menjalankan fungsinya dan meneliti apakah syarat-syarat perceraian terpenuhi atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun ada hal yang perlu di ingat berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara perceraian yang di ajukan oleh masyarakat. Karena itu pengadilan agama pun tidak boleh menolak perkara perceraian apabila ada masyarakat yang mengajukan. Dengan begitu masyarakat yang datang ke pengadilan untuk mengurus berbagai perkara dalam hal demikian sangat diperlukan nantinya oleh para penerima pelayanan atau masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengurusan administrasi perceraian, terutama mengenai prosedur pengurusan administrasi perceraian di pengadilan agama Bangkinang.

Dalam impelementasinya ada beberapa pelayanan yang masih kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat yaitu terkait sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian yang mana saat ini selain melakukan proses perceraian secara manual, pengadilan agama Bangkinang telah menggunakan sistem peradilan berbasis Online (E-Court), sebagai upaya lembaga peradilan di Indonesia memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan kemajuan teknologi. E-Court ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah adanya penerapan kebijakan tersebut ternyata banyak keluhan masyarakat akibat adanya transisi atau perubahan sistem kepengurusan dan prosedur administrasi perceraian yang mana sebelumnya masyarakat hanya mengetahui sistem administrasi yang dilakukan secara manual dan tatap muka saja, tidak banyak dari masyarakat yang paham dengan adanya sistem administrasi perceraian yang saat ini diterapkan menggunakan aplikasi online atau E-court. Seharusnya apabila masyarakat paham dengan sistem E-court tersebut tentu akan ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat mulai dari ke efesiensi waktu dan biaya saat menggunakan sistem tersebut, salah satunya yaitu masyarakat tidak dikenai lagi biaya pemanggilan pihak karna pemanggilan pihak berperkara dapat dilakukan secara elektronik.

Diketahui bahwa untuk perkara yang menggunakan sistem manual berdasarkan SK Ketua PA Bangkinang Kelas 1-B Nomor : W4-A3/172/HK.05/3/2020 Tentang Tarif, Jenis-Jenis Biaya Berperkara Dan Pembukuannya Serta Radius Biaya Perkara Pada Wilayah Hukum Peradilan Agama Bagkinang Kelas 1-B. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada pengadilan agama bangkinnag kelas 1-B diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/dibayar oleh pihak-pihak perkara. Biaya tersebut dimulai dari biaya pendaftaran, biaya ATK perkara, biaya redaksi, biaya materai, leges dan biaya pemanggilan penggugat/ pemohon. Dan adapun untuk biaya pemanggilan dan pemberitahuan, maka karena wilayah hukum pengadilan agama Bangkinang kelas 1-B meliputi kelurahan dan desa-desa yang berada dalam wilayah hukum kabupaten Kampar, sehingga tarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

biaya panggilan/pemberitahuan dibedakan kepada radius I,II,III,IV,V,VI,VII dan daerah sulit yang rinciannya tersebut dalam lampiran surat keputusan.

Panggilan, pemberitahuan, penyampaian surat/ berkas masing-masing sebagai berikut :

1. Radius I (0-15 KM) = (Rp. 50.000)
2. Radius II (0-50 KM) = (Rp. 75.000- Rp.150.000)
3. Radius III (0-75 KM) = (Rp. 85.000-Rp.175.000)
4. Radius IV (0-125 KM) = (Rp. 150.000-Rp.300.000)
5. Radius V (0-150 KM) = (Rp. 250.000-Rp.300.000)
6. Radius VI (0-175 KM) = (Rp. 300.000-Rp.500.000)
7. Radius VII (0-200 KM) = (Rp. 350.000-Rp.500.000)
8. Radius Daerah Tersulit (0-250 KM) = (Rp.350.000-Rp.600.000)

Berdasarkan rincian biaya yang disebutkan demikian yang telah disesuaikan dengan jarak dan waktu tempuh untuk pemanggilan pihak berperkara akan memberatkan masyarakat apabila melakukan perceraian menggunakan sistem manual. Perubahan sistem E-court saat ini haruslah mampu menciptakan bentuk proses pengolahan administrasi perkara yang sederhana dan hemat biaya. Penyerdaerhanaan proses ini berguna untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun efektif . Namun ternyata kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena masih banyak kendala, banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem ini disebabkan oleh sarana dan prasarana di sejumlah wilayah masyarakat tinggal berbeda-beda, adanya keterbatasan teknologi dan jaringan yang kurang memadai membuat masyarakat enggan menggunakan sistem tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disamping itu server E-court yang terkadang tidak bisa di akses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu dan proses pengunggahan berkas yang membutuhkan waktu cukup lama, kendala sambungan jaringan juga mengakibatkan dokumen yang dikirimkan kepada pihak penerima tidak terkirim. Dengan adanya gangguan tersebut masyarakat yang awalnya ingin melakukan proses penyelesaian perkara perceraian secara e-court lebih memilih untuk datang langsung ke pengadilan dan melakukan proses penyelesaian perkara secara manual karna sulitnya mengakses server e-court dan melakukan apload dokumen perceraian.

Disisi lain pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap sistem tersebut juga menjadi kendala, hanya sedikit masyarakat yang benar-benar paham menggunakan sistem tersebut, terutama harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti email aktif, nomor rekening, aktivasi akun yang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah akan sulit menjangkaunya, ketidak fahaman masyarakat akan teknologi akan menjadi kendala. Masyarakat tidak ingin sulit karena jika menggunakan e-court pihak harus menyediakan perangkat untuk menunjang hal tersebut, selain itu penyelenggara administrasi peradilan yang mengalami transisi mengharuskan perubahan pola pikir yang harus dirubah baik penyelenggara maupun masyarakat. Apalagi sistem terkait prosedur penyelesaian perkara perceraian ini masih tergolong kebijakan baru pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Secara Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan terkait sistem dan prosedur perceraian yang saat ini telah mengalami perubahan dari manual ke elektronik, tentu banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi ini, bagaimana prosedurnya dan apa saja syarat serta dokumen yang harus dilengkapi sebelum mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan, dengan demikian hal tersebut juga menjadi kendala pada saat melakukan proses penyelesaian perkara perceraian nantinya dan akan membuat masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah dan judul diatas maka penulis merumuskan masalah yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B.
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B?
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B?

1.4 Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut ada beberapa kegunaan yang dapat diperoleh yaitu :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan penelitian di Fakultas Ekonomi Sosial Dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara praktis, bagi Pengadilan Agama Bangkinang dapat menjadi masukan sesuai dengan temuan data sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
- c. Bagi penulis, menjadi tambahan pengetahuan dan praktek nyata dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan pengetahuan yang selama ini didapatkan dalam proses perkuliahan.
- d. Dan salah satu syarat bagi Penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S-I) Program Studi Ilmu Administrasi Negara fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5 Batasan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian tidak menyimpang dari pokok masalahnya, maka batasan masalah di batasi pada sistem dan prosedur pelayanan di bagian administrasi di kantor Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami hasil penelitian dan agar lebih terarahnya penulisan penelitian ini maka penulis membagi proposal ini kedalam tiga bab. Bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab yang mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II membuat landasan teori berupa konsep operasional yang melandasi penelitian hingga dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan terkait sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Bab III memuat metode penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

Pada Bab ini penulis mengemukakan gambaran tentang sejarah singkat pengadilan agaman Bangkinang Kelas 1-B.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini merupakan Bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Implementasi

2.1.1 Pengertian implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksana atau penerapan. Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky juga mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktifitas yang paling menyesuaikan. Dari pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Syafriyanto, 2015: 68).

Grindle dalam (Akib, 2010: 2) mengemukakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi juga dikemukakan oleh Lane dalam (Akib, 2010: 2) implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Jadi implentasi dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

2.1.2 Model implementasi

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, meng-kombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya (Akib, 2010: 5)

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan mengacu pada pendapat Edward III dalam (Akib, 2010: 5-6) mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di-sampaikan.
2. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.
4. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2 Sistem dan Prosedur

2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau grup dari bagian komponen apa pun baik fisik yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*sustem*” yang memberikan arti sebagai suatu kelompok objek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi, atau bergerak secara independen dan harmonis (Darmawan dan Fauzi, 2013: 8).

Menurut Mc Load dalam (Darmawan dan Fauzi, 2013: 4) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Jugiyano dalam (Darmawan dan Fauzi, 2013: 4) terdapat dua kelompok pendekatan sistem di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan pada prosedur dan pendekatan pada komponen-komponen, serta elemen-elemen. Lebih lanjut Cf. J.H.R. Van de Poel dalam (Darmawan dan Fauzi, 2013: 8) mengartikan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen diantara mana terdapat adanya hubungan-hubungan, elemen-elemen tersebut yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu.

Sistem juga bekerja dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, yaitu a.) seluruh komponen sistem b.) sumber masukan sistem c.) hal-hal yang memengaruhi keluaran dari sistem d.) faktor –faktor eksternal dari sistem. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dengan batasan-batasan yang ada dalam suatu sistem, maka akan mendorong pada kualitas kinerja sistem itu sendiri. Maka proses kerja dalam setiap sistem akan memunculkan suatu keluaran (output) secara kontinu, kemudian dievaluasi melalui tindakan umpan balik. Jika output tadi berisi informasi-informasi yang bertentangan atau penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, maka informasi penyimpangan ini akan menjadi suatu masukan dalam sistem selanjutnya. Dan akhirnya jika hasil umpan balik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diterima oleh sistem, maka sistem akan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meyakini bahwa output tetap konsisten dengan tujuan sistem semula. Dari kajian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilan (Darmawan dan Fauzi, 2010: 8-9).

2.2.2 Sistem E-Court

E-Court merupakan layanan bagi pengguna Terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Yang terdiri dari layanan: 1.) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 2.) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 3.) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) 4.) e-Litigation (Persidangan secara online).

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya Advokat selaku Pengguna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. .
 Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online :

- a. Pendaftaran Perkara (e-Filing) : Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.
- b. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum) : Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia
- c. Mendapatkan Nomor Perkara : Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan
- d. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons) : Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

- e. Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) : Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.
- f. Putusan secara Elektronik : Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.
- g. E-Payment : Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara.

2.2.3 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Cole seperti yang telah diterjemahkan oleh Zaki Baridwan prosedur adalah suatu urutan – urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Parianti, 2015).

Sedangkan menurut Crisyanti (2011:143) prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Menurut susanto dalam (Dewi, 2015: 2) Prosedur adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kegiatan yang sama. Jadi prosedur dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara baku atau agar memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

2.3 Pelayanan

2.3.1 Pengertian pelayanan

Di dalam kamus Bahasa Indonesia pelayanan yang mengandung pengertian sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu mempersiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Kemudian untuk kelancaran jalannya pelayanan dalam suatu organisasi atau instansi, maka diperlukan adanya pengaturan yang ditentukan dalam Kep.MenPan No. 81/1993 tentang : bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gronroos dalam (Ratminto dan Winarsih, 2005:2) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Hasibuan dalam (Muslim dan Hadi, 2017: 31) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dalam etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan mengikuti definisi tersebut di atas, pelayanan public atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang atau jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan praturan peundang-undangan (Ratminto dan Winarsih, 2005: 5).

2.3.2 Prinsip Standar Pelayanan

Di dalam Keputusan MENPAN Nompr 63 Tahun 2003 di sebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan mencakup kejelasan dalam hal : 1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik 2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dapat memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 3. Rincia biaya publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, produk pelayana public diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dankepatian hukum.
- f. Tangungjawab, pimpinan peyelegaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

- h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopaan, dan keramahan pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun dan ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

2.3.3 Azas-azas Pelayanan

Pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Substansi pelayanan publik salah satunya Pengadilan Agama harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arit meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Oleh karna banyaknya ragam persoalan tersebut tidak tidak semuanya dapat dicapai tanpa adanya bantuan orang lain. Oleh karna itu untuk dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan sebagai berikut sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 :

- a. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberidan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektifitas
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan ras, suku agama, golonganm gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak da kewajibab masing-masing pihak.

2.3.4 Standar Pelayanan

Sehubungan dengan azas-azas pelayanan diatas, maka setiap penyelenggraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan diublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pegaduan.
- b. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pegaduan.
- c. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2.4 Administrasi

Menurut sila dalam (Marliani, 2018: 17-18) Administrasi dalam artian sempit sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Administrasi dalam artian luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada beberapa pendapat para ahli tentang administrasi dalam arti kerjasama adalah sebagai berikut: Herbert Simonmen definisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dwight Waldomem berikan definisi administrasi sebagai daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Dimock & Dimock mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh masyarakat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Sedangkan Sondang P. Siagianmen definisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Marliani, 2018: 18).

Menurut Pasolong dalam (Marliani, 2018: 18) dari beberapa pendapat tentang pengertian administrasi di atas, pada dasarnya administrasi terdiri dari dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi. Dimensi karakteristik administrasi terdiri dari : 1. Efisien, yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. 2. Efektifitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. 3. Rasional, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, yang dilakukan secara sadar dan sengaja.

2.5 Perceraian

2.5.1 Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah: “*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti (Azizah, 2012: 417). Pengertian lain menyatakan bahwa perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian (Sampurna dan Yuliani, 2017: 54).

Sedangkan menurut Undang - Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 (pasal 16), Perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh penghasilan yang bersangkutan.

2.5.2 Proses Administrasi dalam Perceraian

Ada dua jenis perkara perceraian :

- a. Cerai Talak

Yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai Pemohon dan isteri disebut sebagai Termohon. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau Kuasanya :

1. Mengajukan permohonan

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum.
3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama :
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon).
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
 - c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
 - d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Permohonan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon.
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.
6. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 273 R.Bg).
- b. Cerai Gugat
Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (Istri) atau Kuasanya :
 1. Mengajukan permohonan
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah
 - b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama mahkamah syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan
 - c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak berubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan tergugat.
 2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat
 - b. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah di sepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syari'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
 - c. Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
 - d. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.
3. Gugatan tersebut dimuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan Posita)
 4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu tempat dan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6. Penggugat dan tergugat serta kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

2.5.3 Prosedur Berperkara Secara Manual

Apabila penggugat telah memenuhi syarat pengajuan perkara maka pihak penggugat dapat melakukan prosedur berpekara, yaitu :

1. Pihak yang berperkara datang ke PTSP Pengadilan agama dan menyiapkan surat gugatan/permohonan beserta persyaratan pendaftaran lainnya.
2. Pihak yang berperkara kemudian menyerahkan surat gugatan/permohonan kepada petugas Pelayanan Informasi pertama yang bertugas untuk memberikan informasi tentang syarat menerima permohonan pengaduan perkara.
3. Pihak yang berperkara kemudian beralih ke petugas pelayanan pendaftaran untuk melakukan pendaftaran perkara gugatan/permohonan dan pendaftaran surat kuasa dan kemudian akan menyerahkan surat gugatan/permohonan dilengkapi SKUM kepada pihak yang berperkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM kepada petugas pelayanan pembayaran untuk melakukan penafsiran panjar biaya perkara.
5. SKUM yang telah diberi nomor perkara dan dibuahi tanda tangan diserahkan kepada pihak yang berperkara, untuk dasarnya menyetorkan panjar biaya perkara ke bank.
6. Pihak yang berperkara melakukan pembayaran dan akan diberikan slip setoran bank yang telah disahkan.
7. Pihak berperkara akan menunjukkan bukti setoran bank (slip yang telah disahkan) dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda tangan lunas.
8. Petugas pelayanan pembayaran akan menyerahkan 1 lembar SKUM yang telah diberi stempel lunas dan salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara. Apabila prosedur berperkara telah selesai maka pihak berperkara dapat menunggu sampai jurusita memanggil ke alamat kedua pihak berperkara, untuk menghadiri sidang setelah ditetapkan hari sidangnya oleh ketua majelis. (<http://www.pamimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf>)

2.5.4 Prosedur Berperkara Secara E-court

1. Administrasi Perkara Secara Elektronik

a. Pendaftaran Online (e-Filing)

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring online, melalui aplikasi e-Court yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui web browser. Pengguna melakukan login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk Pdf dan Word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan. Pada aplikasi e-Court belum ada menu khusus sebagai tempat untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh Pengguna terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama. Pada tahapan ini, surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, dapat diupload kemudian akan muncul e-SKUM dan virtual account (VA). Dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak berperkara bahwa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik.

Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Memilih pengadilan yang berwenang.
- b. Mengunggah surat kuasa khusus.
- c. Mendapatkan nomor pendaftaran on-line (bukan nomor perkara)
- d. Menginput data pihak.
- e. Mengunggah upload dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.

Adapun pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada e-court meliputi:

- a. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (Penggugat lebih dari satu atau Tergugat lebih dari satu.
- b. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syari'ah atau gugatan jenis perdata lainnya.
- c. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu Pemohon dan Para Pemohon.
- d. Gugatan perlawanan/verzet, yakni bagi pihak Tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek.
- e. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja e-Court menerima gugatan secara intervensi. Penggugat intervensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengajukan surat gugatan pada meja e-Court dengan proses seperti pada pendaftaran gugatan biasa. Penggugat intervensi akan dipanggil untuk menghadap persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita/Jurustia Pengganti melalui domisili elektronik. Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah gugatan intervensi tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut ataukah ditolak.

b. Pembayaran Online (e-Payment)

Aplikasi e-Court menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur e-payment masyarakat pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (virtual account) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui sms banking, internet banking, mobile banking, maupun mendatangi teller bank. Setelah pembayaran yang dilakukan, gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem e-Court di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang ditujuk akan menverifikasi data, menginput data e-court pada sistem SIPP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dilakukan verifikasi data, secara otomatis akan nada nontifikasi kepada pihak Penggugat/Pemohon tentang nomor perkara tersebut. Dokumen yang telah di print out pada aplikasi e-Court sebagai bagian dari berkas perkara. dokumen tersebut setidaknya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berpekara secara e-Count, kartu Advokat (pengguna terdaftar), KTP (pengguna lain), surat kuasa Insidentil/surat tugas (pengguna lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak berpekara.

c. Panggilan Online (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada e-mail Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Adapun jika pihak yang dipanggil berdiam di luar negeri, maka dengan menggunakan aplikasi ROM (Rogatory Online Monitoring). Pemanggilan terhadap pihak yang gaib dilakukan menurut Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan dengan cara penempelan pada papan pengumuman di pintu ruang sidang atau dimuat dalam surat kabar (media massa) yang terbit di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Adapun khusus untuk perkara perceraian berlaku ketentuan seperti diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tata cara pemanggilan yang gaib seperti tersebut diatas belum diatur secara rinci, baik di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara elektronik sehingga ketentuan hukum acara yang baku masih tetap diberlakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpekara. Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-Court dan asli surat persetujuan prinsipal.

Pada tahapan sidang ini, Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada pihak berpekara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, telah disebutkan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, kecuali dalam perkara Tata Usaha Negara adalah pada proses persidangan awal. Apabila pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanggil Tergugat untuk yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, Tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan Termohon hadir). Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berpekara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung. Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat/Termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berpekara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Perceraian

Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwâl al-shakhsiyyah*. *Al-Ahwâl* merupakan jamak dari *alhâl* yang berarti urusan atau keadaan. Sedang *al-shakhsiyyah* berasal dari kata *al-shakhs* yang berarti orang atau manusia. *Al-Shakhsiyyah* itu sendiri berarti kepribadian atau jati diri. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*, yang secara etimologi berarti: “*Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali*” (Toni, 2018:35).

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Perceraian juga dikenal sebagai istilah talak. Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang dasar hukum perceraian talak dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga diatur mengenai tata cara perceraian di dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Islam menghendaki dalam suatu perkawinan untuk mampu dijaga kelestarian dan kelanggengannya dengan semboyannya *sakinah, mawadah dan rahmah* oleh kedua belah piha (suami dan istri). Meskipun diantara keduanya berasal dari latar belakang culture dan etnis yang berbeda tidak menjadi *apologi* untuk mereka berdua saling merendahkan terhadap kekurangan yang dimiliki. Justru dengan perbedaan itulah manusia menjadi lebih dewasa. Sebagaimana dalam firman allah swt dalam Q.S. Al-hujurat ayat 13 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2.7 Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode	Temuan
1.	Khairuni Fatma Siahaan	Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. (2019)	Penelitian Kualitatif	Sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A dapat dikatakan belum optimal, fasilitas Pengadilan Agama Medan masih belum memadai dalam pelayanan, lokasi yang tidak memadai juga menjadi kendala bagi pihak pengadilan agama untuk memberikan fasilitas yang nyaman terhadap masyarakat, selain itu masih adanya standar pelayanan yang belum terlaksana secara optimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Suharto	(Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)Journal Diversi, Volume 1, Nomor 2, September 2015 : 114-253	Penelitian Ini Menggunakan Metode Empiris Dengan Persolan Yang Diangkat.	Temuan dalam pengkajian ini dapat mengetahui lebih dalam apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama. Apa saja tugas kepanitera dan kesekretariatan di Pengadilan Agama, lalu bagaimana prosedur perkara di Pengadilan Agama
3.	Rizki Hegia Sampurna Dan Irni Yuliani	(Kualitas Pelayanan Perkara Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi) Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017	Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan atau desain studi kasus dan Didukung Data Primer Melalui Wawancara mendalam kepada informan	Kualitas pelayanan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sukabumi kurang baik. Hal ini nampak dari masih ada sejumlah keluhan dari masyarakat seperti sempitnya ruang pendaftaran dan ruang mediasi, Dan berdasarkan data yang disampaikan informan bahwa kehandalan dalam layanan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sukabumi sudah baik. bahwa kualitas pelayanan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sukabumi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				kurang baik. Hal ini dikarenakan masih ada sejumlah keluhan dari masyarakat seperti kurang responnya petugas administrasi perkara di Kantor Pengadilan Agama Sukabumi kepada masyarakat sehingga ada beberapa dimensi yang dikatakan sudah baik dan kurang baik.
--	--	--	--	--

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan untuk mengetahui batasan-batasan yang jelas dari konsep-konsep yang akan diteliti, maka adapun definisi konsep pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Grindle dalam (Akib, 2010: 2) Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
2. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan atau grup dari bagian komponen apa pun baik fisik yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan (Darmawan dan Fauzi, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menurut Cole seperti yang telah diterjemahkan oleh Zaki Baridwan prosedur adalah suatu urutan –urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Parianti, 2015).
4. Menurut Gronroos dalam (Ratminto dan Winarsih, 2005: 2) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.
5. Menurut Silaht dalam (Marliani, 2018: 17-18) Administrasi dalam artian sempit sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Istilah administrasi berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama.
6. Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian (Sampurna dan Yuliani, 2017: 54).

2.5 Operasional Konsep

Dalam konsep operasional penulis menggunakan satu variabel dan pedoman pada teori, yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Variable Konsep

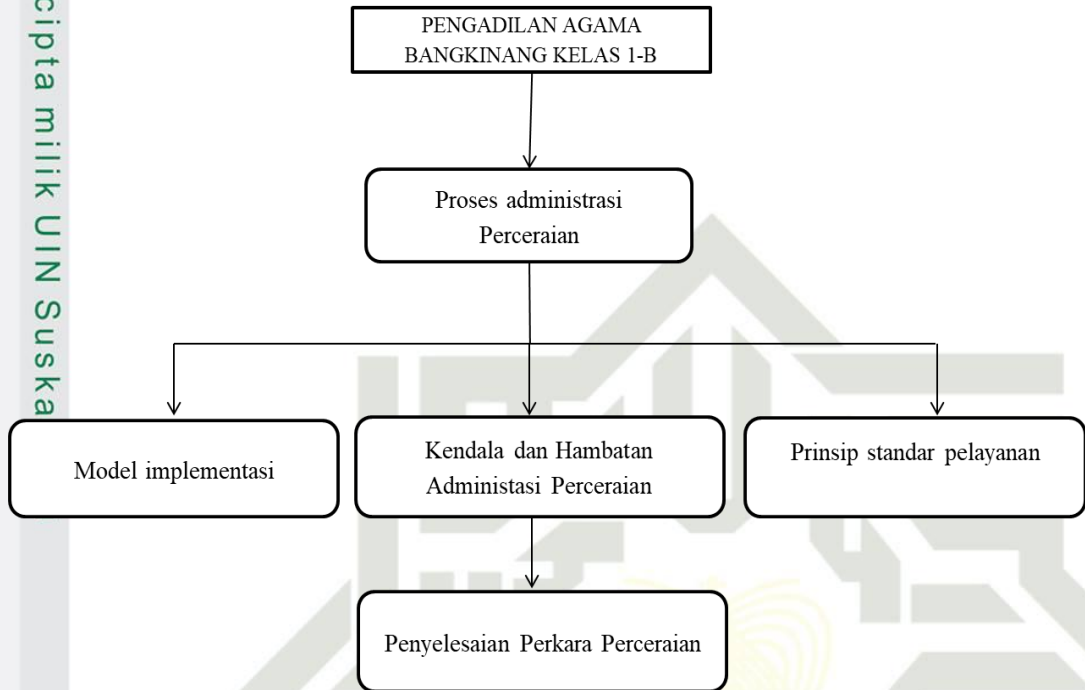
Variable	Indikator	Sub Indikator
Pendapat Edward III dalam (Akib, 2010: 5-6) mengenai empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi.	a. Komunikasi	a. Peyampaian dan b. Kejelasan informasi
	b. Sumber Daya	a. Staf b. Fasilitas
	c. Disposisi	a. Komitmen pelaksana terhadap program
	d. Struktur birokrasi	a. Prosedur operasional standar (tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan)

Sumber : (Akib : 2010)

2.10 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi sistem dan prosedur administrasi perceraian yang dilaksanakan di pengadilan agama Bangkinang Kelas 1-B, mulai dari proses administrasi perceraian sampai menemukan kendala dan hambatan dalam sistem dan prosedur administrasi perceraian hingga mencapai tujuan akhir. Kerangka pemikiran digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran pada penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak dan sepenuhnya juga belum dapat diukur di lapangan.

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B Jalan Jendral Sudirman No.99, Langgini, Bangkinag, Kec.Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463. Penelitian ini dilakukan mulai dari Desember 2020 sampai selesai.

1.2 Jenis dan Sumber Data

1.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail (Konfrenhensip), serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini.

1.2.2 Sumber data

Penelitian ini memerlukan sumber data yang akan membantu pengumpulan data lapangan, antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan langsung di lapangan (Observasi), dan melakukan wawancara langsung kepada para informan peneliti.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen geografis, foto-foto, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Sandu Siyoto, 2015). Disini peneliti memperoleh sumber data sekunder yang berasal dari situs-situs resmi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.

1.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak informan yang terjangkau. Informan Penelitian disini merupakan orang-orang yang diminta keterangannya mengenai permasalahan yang dibahas didalam suatu penelitian. Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lain (Sandu siyoto, 2015).

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang Dianggap sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:85) bahwa teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tahutentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki criteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Key Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1.	DRS. H. Rudi Hartono, S.H	Ketua PA Bangkinang
2.	Nurazmi, S.Ag	Panitera Muda Hukum
3	Meilina Yulien, S.Kom, S.Sy	Staf
4	Masyarakat yang mengurus perkara perceraian	3 orang

Sumber Data : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B Tahun 2020.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat dilapangan tentang

Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang
Kelas 1-B.

b. Wawancara

Metode ini mencakup cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seseorang informan. Sesuai dengan rencana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, maka pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang diwawancarai. Dengan wawancara ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak bergantung pada wawancara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, fotofoto, catatan kasus dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini penelitian mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian.

1.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Artinya dari data yang diperoleh dari penelitian, disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Model analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif. Model Interaktif terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan berlanjut terus setelah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

3. Menarik Kesimpulan

Dari permulaan pengolahan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas setiap permasalahan yang ada.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K.H. ABD.MALIK. Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali. Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus administrasi perkara dan sekretaris bertanggungjawab dalam administerasi umum.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilyah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

4.1.1 Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang

State Islamic University of Su

Pengadilan Agama pada mulanya dianggap sebagai pengadilan semu (*quasi court*). Kedudukan Pengadilan Agama baru sederajat dengan Lingkungan Peradilan lain setelah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun ketika itu masih belum dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah ada *viat eksekusi* (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri.

Kedudukan Pengadilan Agama benar-benar sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya serta dapat mengeksekusi putusannya setelah diundangkan UU

if Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini semakin kukuh dan mantap dengan diamandemennya Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pengadilan Agama Bangkinang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

4.2 Tupoksi Serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B

4.2.1 Tugas Pokok Pengadilan

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menerima
2. Memeriksa,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memutus dan
4. Menyelesaikan.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azaz bahwa "hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya? tentang tugas pokok Peradilan Agama juga telah diatur didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 pasal 1 dan 2 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya. Adapun setelah adanya lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Peradilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama paska Undang-Undang No 3 Tahun 2006 meliputi penyelesaian sengketa bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Perwakafan
- e. Zakat
- f. Infaq sadaqah dan
- g. Ekonomi syari'ah, antara lain : Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

4.2.2 Fungsi Pengadilan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
3. Fungsi sebagai mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)
4. Fungsi Nasehat, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) dan pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Agama Bangkinang.

4.2.3 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B

Dan adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang saat ini yaitu :

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkinang Yang Agung.

Misi :

1. Mewujudkan manajemen pengadilan agama bangkinang yang modern
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan agama bangkinang
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan agama bangkinang

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadilan agama bangkinang

4.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang

Batas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B terdiri dari 20 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Bangkinang Kota terdiri dari 4 Kelurahan/Desa
2. Kec. Kampar terdiri dari 19 Kelurahan/Desa
3. Kec. Tambang terdiri dari 17 Desa
4. Kec. Salo terdiri dari 6 Desa
5. Kec. Kampar Utara terdiri dari 8 Desa
6. Kec. Kampar Timur terdiri dari 9 Desa
7. Kec. Siak Hulu terdiri dari 13 Desa
8. Kec. XIII Koto Kampar terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
9. Kec. Koto Kampar Hulu terdiri dari 6 Desa
10. Kec. Kampar Kiri terdiri dari 22 Kelurahan/Desa
11. Kec. Kampar Kiri Hilir terdiri dari 8 Desa
12. Kec. Kampar Kiri Hulu terdiri dari 25 Desa
13. Kec. Tapung terdiri dari 25 Desa
14. Kec. Tapung Hilir terdiri dari 16 Desa
15. Kec. Tapung Hulu terdiri dari 14 Desa
16. Kec. Kampar Kiri Tengah terdiri dari 11 Desa
17. Kec. Gunung Sahilan terdiri dari 9 Kelurahan/Desa
18. Kec. Perhentian Raja terdiri dari 5 Kelurahan/Desa
19. Kec. Kuok terdiri dari 9 Kelurahan/Desa
20. Kec. Bangkinang terdiri dari 9 Kelurahan/Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.4 Daftar Nama Pimpinan Dari Masa Ke Masa Ketua PA Bangkinang

Table 4.1
Nama Ketua PA Bangkinang Dari Masa Ke Masa

NO	Nama	Periode	Keterangan
1.	KH. Abdul Malik	1958-1969	Pensiun
2	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974	Pensiun
3.	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978	Pensiun
4.	Drs. Idris	1978-1994	Pensiun
5.	Drs. Syahril, SH., MH	1994-2001	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
6.	Drs. Taslim	2001-2003	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
7.	Drs. Syahril, MH	2003-2006	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
8.	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009	Hakim Tinggi PTA Mataram
9.	Drs, H. Sudirman, MH	2009-2011	Mutasi Menjadi Ketua PA Baturaja
10.	Drs. H. Amridal, SH, MA	2011-2012	Mutasi Dari Ketua PA Batusangkar
11.	Dra. Lisdar	2012-2013	Mutasi Dari Ketua PA Muara Bulia
12	Drs. H. MHD. Nasir. S, SH, MHI	2013-2016	Mutasi Dari Ketua PA Koto Baru
13	Drs. Usman, S.H.M.H	2016-2018	Mutasi Menjadi Hakim PA Palu IA
14	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H	2018-2020	Mutasi Menjadi Ketua PA Dumai IB
15	Drs. Rudi Hartono, SH	2020-Sekarang	Ketua PA Bangkinang

Sumber Data :Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.1 Daftar Nama Wakil Ketua PA Bangkinang :

Table 4.2
Nama Wakil Ketua PA Bangkinang Dari Masa Ke Masa

NO	Nama	Periode	Keterangan
1.	Drs. Syahril, SH., MH	1994-2001	PYMT/HT. PTA. Pekanbaru
2.	Drs. Masnur Yusuf. SH., MH	2001-2007	Ketua PA Tembilahan
3.	Drs. H. Sudirman, MH	2007-2008	Dimutasi menjadi Ketua PA Kelas IB Bangkinang
4.	Drs. H. Fuizalman, SH., MH	2008-2001	Mutasi menjadi Hakim Senior PA. Jakarta Selatan
5.	Drs. Sulem Ahmad, SH, MA	2001-2013	Mutasi menjadi Hakim PA Padang
6.	Dra. Roslaini, SH, MA	2013-2016	Mutasi menjadi Wakil Ketua PA Curup
7.	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H	2017-2018	Mutasi dari Ketua PA Pasirpangaraian
8.	Drs. Abdul Rahim, M.H	2019-2020	Mutasi dari Hakim PA. Rantauprapat
9.	Fithriazi AZ. S.Ag	2020-Sekarang	Mutasi dari Ketua PA Selat Panjang

Sumber Data : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B

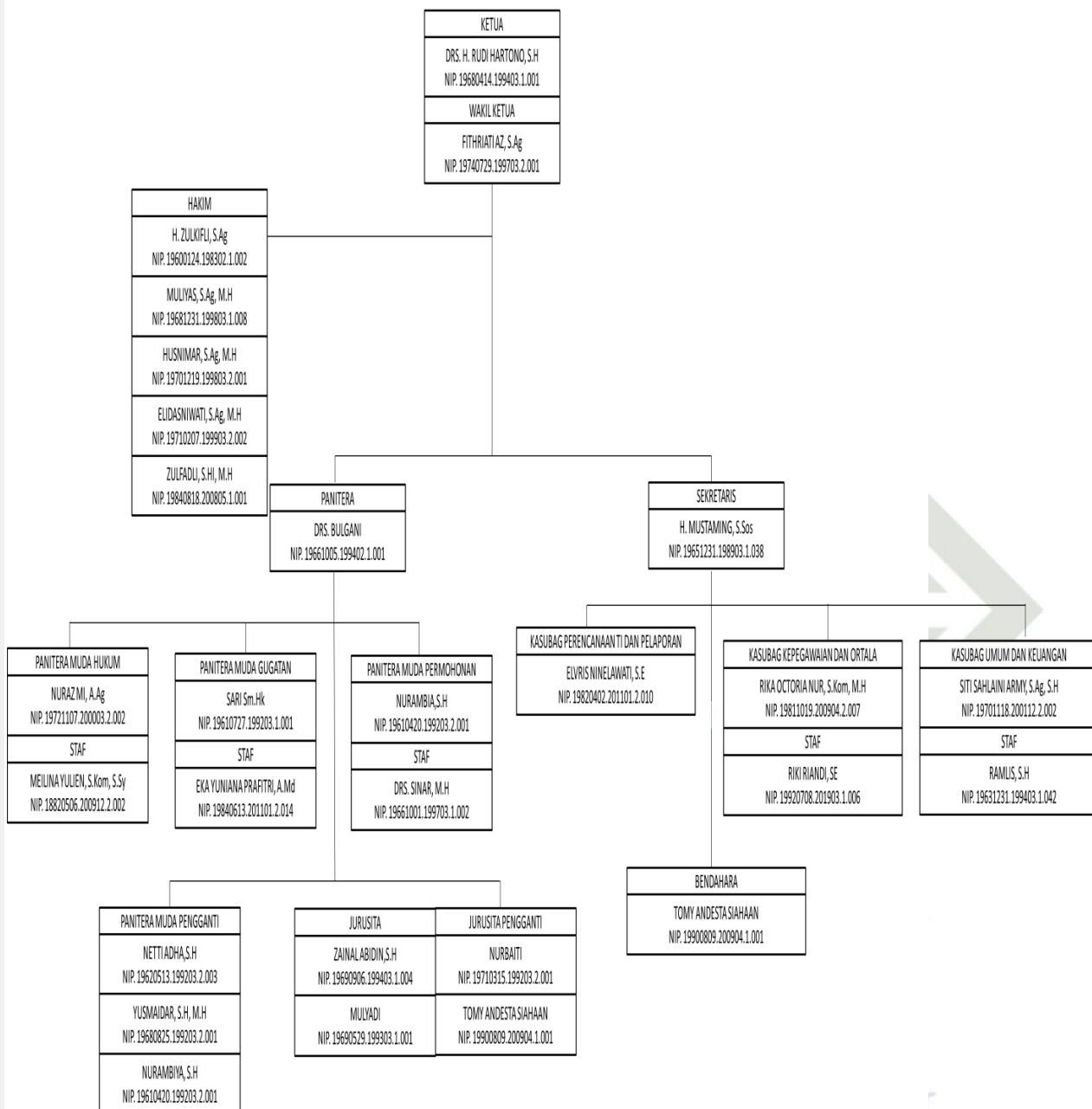
4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di pengadilan agama Bangkinang kelas 1-B yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B yang saat ini selain menggunakan sistem manual juga telah menggunakan sistem E-court dalam proses administrasi penyelesaian perkara perceraian. Namun dengan adanya perubahan sistem administrasi perceraian tersebut menyebabkan beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Kendala dalam sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di pengadilan Agama Bangkinang adalah jika dengan sistem manual masyarakat merasa adanya kendala terkait biaya yang terlalu tinggi dalam melakukan proses perceraian, sedangkan dalam sistem E-court saat ini juga belum dapat terlaksana dengan baik akibat adanya beberapa kendala yang disebabkan oleh sarana dan prasarana di sejumlah wilayah masyarakat tinggal yang berbeda-beda, adanya keterbatasan teknologi dan jaringan, pengetahuan masyarakat yang masih minim, kurangnya sumber daya serta sikap pelaksana kebijakan yang masih membutuhkan sosialisasi dan pelatihan yang lebih mendalam. Sedangkan untuk struktur birokrasi

Pengadilan Agama Bangkinang telah berupaya menjalankan struktur organisasinya dengan berpedoman pada berbagai macam SOP yang dibuat untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan sehingga, peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

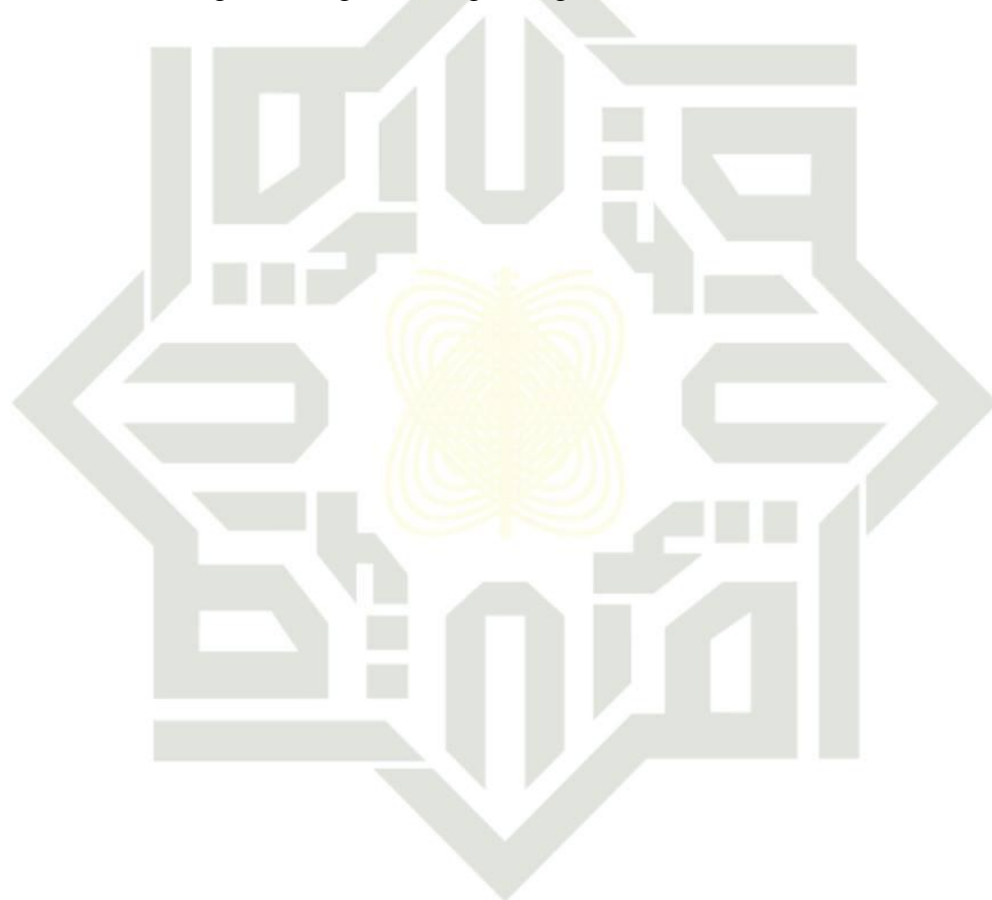
1. Pihak Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B perlu memaksimalkan jaringan dengan pindah provider dengan kecepatan internet yang lebih bagus dan menyediakan genset otomatisasi yang dapat secara otomatis hidup pada saat lampu mati agar tidak menghambat pekerjaan dan mengalami gangguan dalam komunikasi dapat di atasi dengan baik .
2. Melengkapi sumber daya dan sarana prasana di pengadilan agama dengan menambah staff dan sarana pendukung seperti komputer disetiap loket PTSP dan pelayanan lainnya agar dapat memaksimalkan pelayanan dan menghemat waktu dalam proses administrasi.
3. Pihak Pengadilan Agama juga perlu melakukan sosialisasi lebih mendalam dengan melibatkan pihak internal dan eksternal dari pengadilan agama serta pemerintah terkait untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya yang berperkara, mengenai sistem dan prosedur administrasi perceraian di pengadilan agama Bangkinang Kelas 1-B agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses administrasi perkara perceraian dapat dipahami dengan baik dan diproses dengan efektif dan efisien.

4. Pihak Pengadilan Agama Bangkinang dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Agama kemudian memperbaiki kekurangan kekurangan yang dimiliki Pengadilan Agama dan meningkatkan kualitas yang telah dimiliki Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Muzakkir. 2020. *“Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Increased Divorce In The Syari’ah Court”*. Jurnal ilmu hukum.
- Akib Haedar. 2010. *“Implementasi Kebijakan”*. Jurnal Administasi Publik.
- Azizah Linda. 2012. *“Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”*. Dalam jurnal AL-‘ADALAH.
- Darmawan Deni, Fauzi. 2013. *“Sistem Informasi Manajemen”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Dewi Prana, Dzulkirom, Atmanto. 2015. *“Alisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern”*. Jurnal Administasi Bisnis.
- <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf>. Di akses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 13.25 WIB.
- Hegia, R., & Yuliani, I. 2017. *“Kualitas Pelayanan Perkara Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi”*. Dalam jurnal ADHUM.
- Isnayana Samun. 2017. *“Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian”*. Dalam jurnal kajian hukum.
- Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003.
- Marliani Lina. 2018. *“Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang”*.
- Muslim, Hadi. 2017. *“Pelayanan Publi”*. Pekanbaru : Kreasi Edukasi
- Paizanti. 2015. *“Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penjualan Gas Industri Pada Pt. Surya Biru Murni Cabang Samarinda”*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- PERMA RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Ratminto, Winarsih. 2015. *“Manajemen Pelayanan Publik”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sihnan Fatma K. 2019. *“Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A”*.
- Sivoto, S., & Sodik, A. 2015. *“Dasar Metodologi Penelitian”*.
- Supriyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”*. Bandung :Alfabeta. 2003.
- Suharto. 2015. *“Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)”*. Journal Diversi.
- Syafrianto. 2015. *“Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial”*. Dalam jurnal pendidikan islam.
- Totik Agus. 2018. *“Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”*. Jurnal hukum islam.
- Undang- Undang Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Pasal 49 ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I

Instrumen Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Agama

1. Bagaimana pelaksanaan kepengurusan administrasi perceraian di pengadilan agama Bangkinang?
2. Apa sistem yang saat ini digunakan untuk mengurus administrasi perceraian di PA Bangkinang?
3. Kapan mulai penerapan sistem ini dilaksanakan di PA Bangkinang?
4. Bagaimana awal mula sistem ini dilaksanakan di PA Bangkinang?
5. Bagaimana prosedur dari sistem tersebut?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap sistem tersebut,?
7. Bagaimana respon pegawai terhadap adanya sistem tersebut?
8. Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan kepengurusan terkait pelaksanaan administrasi perceraian di PA Bangkinang ?
9. Apa masing-masing tugas dari stakeholders tersebut?
10. Apa saja sarana dan prasarana yang saat ini digunakan untuk mengurus dan memberikan pelayanan terkait administrasi perceraian di PA Bangkinang?

b. Panitera Muda Hukum Dan Staff

1. Bagaimana implementasi dari sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di PA Bangkinang?
2. Apa upaya dari PA Bangkinang untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di PA Bangkinang?
4. Apa upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
5. Bagaimanakah pelaksanaan dari sistem E-Court yang saat ini diterapkan, efektif/efisien?
6. Apa kekurangan dan kelebihan dengan adanya sistem E-Court tersebut?
7. Apakah sistem E-Court yang saat diterapkan telah sesuai dengan SOP?
8. Bagaimanakah keterkaitan struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di PA Bangkinang?
9. Apa upaya yang dilakukan oleh PA Bangkinang agar dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat/penerima pelayanan sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik?

c. Masyarakat

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu terkait sistem dalam mengurus administrasi perceraian di PA Bangkinang?
2. Apa saja syarat dan prosedur yang harus bapak/ibu lengkapi dan lalui?
3. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai pelayanan di PA, sudah tepat sasaran dan efektif/efisien?
4. Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat mengurus administrasi perceraian?
5. Sistem apa yang saat ini bapak/ibu gunakan dalam mengurus administrasi perceraian?
6. Apa hambatan dan kemudahan yang bapak/ibu rasakan dengan adanya sistem E-court?
7. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimanakah sarana prasarana serta fasilitas yang telah disediakan oleh PA Bangkinang?
8. Apa harapan serta saran dari bapak/ibu agar PA Bangkinang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terkait sistem dan prosedur

pelayanan administrasi perceraian kepada masyarakat untuk kedepannya?

Lampiran II

Bersama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B Bapak Rudi Hartono, S.H



Bersama Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangkinang Ibu Nur Azmi, S.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State

Altan Syarif Kasim Riau

Bersama Staff Panitia Muda Hukum Ibu Meilina Yulien, S.Kom, S.Sy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama masyarakat yang mengurus administrasi perceraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto PTSP di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B



Foto visi dan misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B



Foto piagam pencanangan pembangunan zona integritas PA Bangkinang



Foto struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1260/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 17 Februari 2021 M
 5 Rajab 1442 H

Kepada
 Yth. **Irdyanti, S.IP, MA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

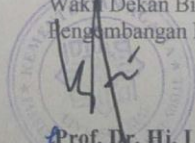
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nur Azlin
 NIM : 11775200092
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19551112 199903 2 001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1572/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 03 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Azlin
NIM. : 11775200092
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39456
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1572/2021 Tanggal 3 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NUR AZLIN |
| 2. NIM / KTP | : 11775200092 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I-B. JALAN H.R.SOEBRANTAS |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1-B. |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I-B |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/206

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39456 tanggal Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : NUR AZLIN |
| 2. NIM | : 11775200092 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG, JL.H.R SOEBRANTAS |
| 7. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1-B |
| 8. Lokasi | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I-B |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

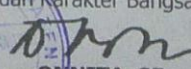
1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I.B
JL.JEND. SUDIRMAN Nomor : 99 TELP (0762) 20176
WEBSITE : <http://www.pa-bangkinang.go.id> Email: pa.bangkinang@yahoo.com
BANGKINANG 28412

REKOMENDASI

Nomor : W4-A3/ 347 /OT.00/2/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B setelah membaca Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/24/2021 tanggal 05 Januari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Nur Azlin |
| 2. NIM | : 11775200092 |
| 3. Program Studi | : Administrasi Negara |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Lokasi | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bangkinang
 Pada tanggal 10 Februari 2021

Ketua



Drs. H. Rudi Hartono, S.H.
 NRP. 196804141994031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I.B
JL. JEND. SUDIRMAN Nomor : 99 TELP (0762) 20176
WEBSITE : <http://www.pa-bangkinang.go.id> Email: pa.bangkinang@yahoo.com
BANGKINANG 28412

Nomor : W4-A3/ 902 /KP.01.2/4/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Balasan Riset

Bangkinang, 15 April 2021

Kepada,
 Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di
 Tempat

Assaalmu'alaikum Wr. Wb

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, setelah membaca surat rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPMPTSP/NON/-IZIN-RISET/394562021/80 tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Nur Azlin |
| 2. NIM | : 11775200092 |
| 3. Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Lokasi | : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1.B |
| 6. Judul | : Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1.B. |

Berdasarkan hasil penelitian / riset proposal yang telah diserahkan, nama di atas benar telah melakukan penelitian/ riset di Pengadilan Agama Bangkinang dan telah di berikan izin.

Demikianlah surat ini di buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Rudi Hartono, S.H.
 NIP. 198004141994031001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis yaitu Nur Azlin, lahir di Desa Kabun Kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau. Pada tanggal 28 September 1998. Anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan ayahanda Azhar dan ibunda Maniati.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 007 Kabun, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS PPMTI (Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Tanjung Berulak. Penulis melanjutkan pendidikannya di MA PPMTI (Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Tanjung Berulak. Setelah lulus MA penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Melalui Jalur SNMPTN di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga.

Pada bulan Januari-Februari 2020 penulis mengikuti Program Praktek Kerja Lapangan di Kantor Camat Marpoyan Damai Pekanbaru. Selain itu pada bulan Juli-Agustus 2020 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata di daerah masing-masing. Penulis melakukan penelitian pada bulan Desember 2020 di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 penulis diujikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul skripsi “Implentasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B”.